

Politik Akuntabilitas dalam Kebijakan Konservasi Global: Kriminalisasi Tradisi Suku Baka oleh African Parks di Odzala-Kokoua

Amelia Fatimatuzzahra¹, Titin Titin²

¹ Program Studi Hubungan Internassional, Universitas Airlangga

² Program Studi Manajemen, Universitas Islam Lamongan

*Email korespondensi: ameliafzahra03@gmail.com

Abstrak

Pendelegasian wewenang pengelolaan kawasan konservasi dari negara kepada aktor non-negara seperti international non-governmental organization (INGO) merupakan fenomena penting dalam tata kelola global, sekaligus memunculkan persoalan akuntabilitas kebijakan publik lintas batas. INGO kerap diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang memperkuat perlindungan lingkungan dan kesejahteraan lokal, namun dalam praktiknya kebijakan yang dijalankan justru dapat menghasilkan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan kerangka peran dan akuntabilitas INGO untuk menganalisis bagaimana kebijakan tata kelola konservasi African Parks berkontribusi pada pelanggaran HAM Suku Baka di Odzala-Kokoua National Park (OKNP) dan mengapa kebijakan tersebut tetap dipertahankan. Penelitian menggunakan metode kualitatif-eksplanatif melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum konservasi African Parks mengkriminalisasi tradisi Suku Baka, membatasi akses wilayah leluhur, melegitimasi kekerasan aparat kawasan, dan memarginalkan masyarakat lokal dari proses kebijakan. Keberlanjutan kebijakan ini dipengaruhi oleh struktur akuntabilitas yang lebih berorientasi pada donor (upward accountability) ketimbang masyarakat terdampak (downward accountability), mencerminkan persoalan klasik siapa yang diuntungkan ketika wewenang publik didelegasikan ke aktor non-negara. Penyelesaian pelanggaran HAM terhadap Suku Baka pun hanya bersifat prosedural tanpa dampak korektif nyata — bentuk akuntabilitas semu yang menegaskan perlunya reformasi kebijakan akuntabilitas aktor non-negara dalam tata kelola konservasi global.

Kata kunci: African Parks; Suku Baka; INGO; Kebijakan Konservasi; Akuntabilitas Publik; Tata Kelola Global

The Politics of Accountability in Global Conservation Policy: The Criminalization of Baka Traditions by African Parks in Odzala-Kokoua

Abstract

The delegation of protected-area governance from the state to non-state actors such as international non-governmental organizations (INGOs) is a defining feature of global governance, raising questions of cross-border public accountability. INGOs are often framed as policy instruments that strengthen environmental protection and local welfare, yet the policies they implement can produce serious human rights violations. This study draws on frameworks of INGO role and accountability to examine how African Parks' conservation governance policy contributed to human rights violations against the Baka Tribe in Odzala-Kokoua National Park (OKNP) and why this policy has persisted. Using a qualitative explanatory approach through literature review, document analysis, and data triangulation, the findings show that African Parks' conservation law-enforcement policy criminalized Baka traditions, restricted access to ancestral territory, legitimized the use of force by park security personnel, and marginalized local communities from policy-making processes. The persistence of this policy is shaped by an accountability structure oriented more toward donors (upward accountability) than affected communities (downward accountability), reflecting a classic dilemma of who benefits when public authority is delegated to non-state actors. Resolution of the violations against the Baka remains merely procedural, without substantive corrective impact — a form of pseudo-accountability that underscores the need to reform accountability policy governing non-state actors in global conservation governance.

Keywords: African Parks; Baka Tribe; INGO; Conservation Policy; Public Accountability; Global Governance

PENDAHULUAN

Dalam tata kelola global, *international non-governmental organization* (INGO) sering kali dipandang sebagai aktor yang hadir untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh negara dalam melindungi keamanan manusia dan lingkungan, misalnya dalam konteks konservasi alam (Brockington & Scholfield, 2010). Salah satu aktor paling menonjol dalam kancah konservasi global adalah African Parks. Didirikan pada tahun 2000, African Parks merupakan organisasi nirlaba yang memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan taman nasional melalui kemitraan jangka panjang dengan pemerintah di seluruh Afrika (African Parks, 2026c). Secara normatif, African Parks mengklaim bahwa model pendekatan mereka berfokus pada keberlanjutan lanskap yang mengintegrasikan perlindungan satwa liar dengan kesejahteraan komunitas lokal. Mereka mempromosikan visi konservasi yang inklusif, di mana penegakan hukum konservasi berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan lindung (African Parks, 2026e). African Parks mengklaim bahwa perlindungan kawasan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat lokal melalui model pengelolaan kawasan yang mereka terapkan (Menon, 2025).

Szporluk (2009) menyebutkan bahwa INGO memang memberikan kontribusi dalam mempromosikan tata kelola global yang baik di mana mereka aktif menyuarakan isu global serta tidak melakukan praktik eksploitatif yang merusak layaknya korporasi. Sisi positif ini juga dicatat oleh Murdie (2014) yang menyoroti bahwa bagi INGO yang bergerak di sektor layanan, peran positif utama mereka adalah memberikan akses pemenuhan kebutuhan esensial yang gagal atau belum mampu disediakan oleh pemerintah setempat, namun dengan catatan bahwa keberhasilan peran tersebut sangat bersyarat. Hal ini terlihat dalam kasus African Parks di Odzala-Kokoua National Park (OKNP), Republik Kongo. Pada November 2010, African Parks menandatangani mandat 25 tahun untuk mengelola OKNP (Pyhälä dkk., 2016). OKNP merupakan kawasan hutan hujan tropis yang secara historis menjadi rumah peradaban bagi masyarakat adat di mana sistem kehidupan, struktur sosial, dan identitas kultural mereka telah menyatu dan bergantung sepenuhnya pada ekosistem hutan tersebut. Ketergantungan tersebut juga tercermin dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitar OKNP. Survei terhadap 37 desa yang mencakup sekitar 28% rumah tangga di kawasan tersebut menunjukkan bahwa 65-72% konsumsi pangan rumah tangga berasal dari sumber daya hutan, sementara 20-30% rumah tangga memperoleh pendapatan dari aktivitas berburu, dan 38-48% konsumsi makanan mengandung daging satwa liar (Mavah dkk., 2018). Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap hutan tidak hanya berkaitan dengan identitas budaya masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama ketahanan pangan dan sumber penghidupan mereka.

Lebih jauh, di satu sisi, pendekatan tata kelola konservasi African Parks itu dilaporkan tidak hanya mampu untuk mengamankan 13.867 km² kawasan OKNP dan menyita 89.000 kg daging satwa liar saja, tetapi juga mengklaim mampu mengembangkan kolaborasi aktivitas ekonomi kakao dan mangga liar dengan masyarakat lokal (African Parks, 2024b). Namun di sisi lain, meskipun secara normatif INGO dipandang sebagai aktor yang ideal, peran tersebut sering kali bersifat paradoksal. Dalam praktiknya, INGO tidak hanya memberikan hasil yang positif, tetapi juga mampu memicu hasil yang problematik di lapangan (Barber & Bowie, 2008; Murdie, 2014; Szporluk, 2009). Hal ini terlihat dalam kasus African Parks di mana kehadirannya juga dikaitkan dengan berbagai praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Suku Baka yang tinggal di sekitar OKNP (Pyhälä dkk., 2016). Terdapat kesenjangan antara klaim normatif African Parks dengan apa

yang terjadi di lapangan. Meskipun klaim konservasi African Parks diintegrasikan dengan kesejahteraan masyarakat, namun model yang diadopsi adalah pendekatan yang memisahkan manusia dari alam, sehingga masyarakat adat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan dianggap sebagai ancaman (World Rainforest Movement, 2022). Pada Januari 2024, African Parks pertama kali dilaporkan secara publik atas pelanggaran HAM besar-besaran terhadap Suku Baka di OKNP oleh media Inggris Daily Mail, menyusul surat-surat dan kampanye yang dilancarkan oleh Survival International pada pertengahan tahun 2023 (Bascomb, 2025). Laporan tersebut mengungkap adanya praktik kekerasan oleh para penjaga African Parks, termasuk pemukulan, penyiksaan, dan lain sebagainya terhadap Suku Baka sebagai bagian dari upaya penegakan hukum konservasi mereka, hanya karena mereka ingin mengakses wilayah leluhurnya (Survival Internasional, 2026).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana African Parks sebagai INGO berperan dalam mencederai HAM Suku Baka sebagai masyarakat lokal dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual mengenai peran INGO dalam isu HAM yang dikembangkan oleh Barber dan Bowie (2008), Szporluk (2009), dan Murdie (2014), serta akuntabilitas INGO dari Crack (2020) untuk menjelaskan hubungan antara orientasi pertanggungjawaban organisasi dan praktiknya. INGO pada dasarnya dibentuk untuk memperkuat keamanan manusia melalui penyediaan layanan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas peran tersebut bergantung pada sejauh mana tujuan organisasi selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal (Murdie, 2014). Dalam kondisi tertentu, INGO justru dapat menghasilkan dampak yang merugikan ketika organisasi semakin terputus dari realitas masyarakat yang dilayaninya. Szporluk (2009) serta Barber dan Bowie (2008) berpendapat bahwa meskipun INGO membawa misi untuk memperkuat komunitas lokal, mereka kerap memarginalisasi masyarakat karena memaksakan agenda organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya di negara berkembang.

Salah satu faktor yang menjelaskan kondisi tersebut adalah struktur pendanaan INGO yang sangat bergantung pada donor. Ketergantungan ini tidak hanya memengaruhi keberlanjutan organisasi, tetapi juga membentuk orientasi akuntabilitasnya. Szporluk (2009) menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap donor mendorong INGO lebih memprioritaskan kepentingan penyandang dana dibanding komunitas lokal yang mereka layani. Sejalan dengan itu, Murdie (2014) menegaskan bahwa lingkungan pendanaan yang didominasi donor menyulitkan INGO menyesuaikan program dengan realitas lokal sehingga organisasi lebih berorientasi pada pencapaian target proyek daripada dampak sosial yang lebih luas. Barber dan Bowie (2008) juga menambahkan bahwa ketergantungan terhadap donor menyebabkan INGO lebih berperan sebagai perantara antara donor dan komunitas lokal dibanding sebagai organisasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dalam konteks tersebut, akuntabilitas INGO dapat dipahami melalui empat dimensi (Crack, 2020). Pertama, *upward accountability*, di mana INGO bertanggung jawab kepada pemerintah dan donornya. Kedua, *downward accountability*, di mana INGO bertanggung jawab kepada komunitas yang mereka klaim wakili dan layani. Ketiga, *inward accountability*, di mana INGO bertanggung jawab kepada anggota internalnya. Keempat, *horizontal accountability*, di mana mereka bertanggung jawab kepada sektor INGO yang lebih luas. Penelitian ini berfokus pada dimensi *upward accountability* dan *downward accountability* karena keduanya paling relevan untuk menjelaskan hubungan pertanggungjawaban African Parks kepada donor dan masyarakat lokal

dalam kasus ini. Berdasarkan hal ini, penulis berargumen bahwa African Parks sebagai INGO berperan dalam mencederai HAM Suku Baka di sekitar OKNP dengan memaksakan agenda konservasi yang memisahkan masyarakat lokal dari ruang hidup dan kebutuhan riil mereka. Pencederaan ini terjadi karena struktur pendanaan African Parks yang didominasi oleh donor membuat tindakan akuntabilitasnya lebih berorientasi pada target proyek (*upward*), bukan kepada masyarakat lokal yang terdampak (*downward*).

Kajian terdahulu mengenai evaluasi peran dan orientasi INGO secara konseptual di mana Szporluk (2009) dan Murdie (2014) secara kritis menyoroti intervensi INGO yang berperan dalam memicu dampak negatif ketika mereka memaksakan agenda yang tidak relevan dengan masyarakat. Penjelasan mengenai fenomena *harming* ini diperdalam oleh Barber dan Bowie (2008) di mana dominasi penyandang dana kerap mendistorsi implementasi program, sehingga INGO lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan donor yang mengabaikan kebutuhan esensial masyarakat lokal. Di sisi lain, literatur yang mendokumentasikan dampak operasi konservasi African Parks di Cekungan Kongo dikaji oleh Pyhälä dkk. (2016) dan Mavah dkk. (2018) dengan menyoroti realitas kerusakan di tingkat akar rumput. Pyhälä dkk. (2016) menitikberatkan temuan empirisnya pada dampak regulasi zonasi yang berujung pada tingginya tingkat kemiskinan dan kelaparan Suku Baka akibat pembatasan akses terhadap sumber pangan liar. Melengkapi temuan tersebut, Mavah dkk. (2018) menyoroti kerentanan masyarakat dari aspek hilangnya ruang hidup, di mana program konservasi menyebabkan tertinggalnya jalur pertanian dan terputusnya jalur masyarakat adat dengan hutan leluhurnya.

Kajian Pyhälä dkk. (2016) dan Mavah dkk. (2018) telah menunjukkan berbagai konsekuensi sosial-ekonomi dari konservasi di OKNP, seperti pembatasan akses terhadap hutan, penurunan ketahanan pangan, hingga perubahan mata pencaharian masyarakat lokal. Namun, kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada konsekuensi sosial-ekonomi dari kebijakan konservasi dan belum menjelaskan mekanisme yang menghasilkan konsekuensi tersebut. Sehingga, hubungan antara tata kelola konservasi, orientasi akuntabilitas INGO, dan keberlanjutan pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal masih menyisakan ruang analitis yang penting untuk dikaji. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai dua mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terhadap Suku Baka diproduksi melalui tata kelola konservasi African Parks yang mengkriminalisasi tradisi masyarakat lokal. Kedua, penelitian ini menjelaskan bahwa model tata kelola konservasi yang mengkriminalisasi tradisi Suku Baka tetap dipertahankan karena orientasi akuntabilitas African Parks lebih diarahkan kepada donor (*upward accountability*) daripada masyarakat lokal (*downward accountability*).

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. George dan Merkus mendefinisikan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif sebagai metode yang digunakan untuk penelitian yang menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi (George & Merkus, 2025). Pendekatan eksplanatif dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena pelanggaran HAM di OKNP, tetapi juga menganalisis hubungan antara tata kelola konservasi, orientasi akuntabilitas INGO, dan keberlanjutan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen primer dan sekunder yang dapat mendukung informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Syafuruddin, 2023). Sumber primer merupakan dokumen resmi yang diterbitkan kepada publik oleh negara atau organisasi, sementara sumber sekunder adalah dokumen yang merujuk dan menganalisis sumber primer seperti buku, karya ilmiah, situs web, artikel jurnal penelitian, dan lain-lain (Lamont, 2022). Dalam penelitian ini, dokumen primer meliputi laporan tahunan African Parks, laporan investigasi independen Omnia Strategy LLP, serta publikasi resmi lembaga donor yang berkaitan dengan pengelolaan OKNP. Sementara itu, dokumen sekunder mencakup artikel jurnal, buku, laporan organisasi masyarakat sipil, dan publikasi akademik yang membahas African Parks, konservasi di OKNP dan Republik Kongo, Suku Baka, serta akuntabilitas INGO. Seleksi dokumen didasarkan pada dua kriteria. Pertama, dokumen yang secara langsung membahas operasi African Parks di OKNP, pelanggaran HAM terhadap Suku Baka, atau hubungan antara konservasi dan akuntabilitas INGO. Kedua, dokumen yang diterbitkan oleh organisasi resmi, lembaga penelitian, jurnal ilmiah, atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki rekam jejak dalam isu konservasi dan HAM.

Penelitian ini menggunakan analisis dokumen, sebuah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai jenis dokumen yang sudah ada, seperti buku, artikel koran, jurnal akademik, laporan institusi, dan materi visual (Morgan, 2022). Teknik ini dapat digunakan karena penulis tidak memiliki sumber daya atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian langsung di lapangan, selaras dengan justifikasi yang disebutkan oleh Morgan (2022). Selain itu, analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, dokumen diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya, meliputi dokumen resmi INGO, laporan investigasi independen, laporan organisasi masyarakat sipil, artikel ilmiah, serta dokumen organisasi internasional yang relevan. Kedua, setiap dokumen dihimpun berdasarkan topik-topik yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti model tata kelola konservasi, kriminalisasi praktik tradisional, orientasi akuntabilitas kepada donor dan masyarakat lokal, serta respons organisasi terhadap dugaan pelanggaran HAM. Lebih jauh, penulis membandingkan temuan antar dokumen untuk mengidentifikasi pola yang konsisten maupun kontradiksi antar sumber. Analisis tidak hanya diarahkan pada isi dokumen, tetapi juga pada cara African Parks membingkai keberhasilan konservasi, menjelaskan tanggung jawab organisasi, serta merepresentasikan masyarakat lokal dalam berbagai laporan resminya. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka konseptual mengenai peran dan akuntabilitas INGO untuk menjelaskan bagaimana tata kelola konservasi African Parks memproduksi pelanggaran HAM terhadap Suku Baka serta mengapa praktik tersebut tetap dipertahankan.

Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data melalui rujukan silang antar-dokumen. Triangulasi sumber data merupakan teknik yang digunakan untuk menguji data-data yang telah didapatkan melalui sumber primer dan sekunder (Waris, 2022). Dalam penelitian ini, proses triangulasi dilakukan pada tiga tingkat berdasarkan klasifikasi Valencia (2022). Pertama, triangulasi antar waktu, yaitu membandingkan dokumen yang diterbitkan pada periode berbeda untuk melihat konsistensi informasi mengenai tata kelola konservasi African Parks di OKNP, mulai dari laporan tahunan, laporan investigasi, hingga perkembangan kebijakan organisasi setelah pengakuan pelanggaran HAM pada tahun 2025. Kedua, triangulasi antar sumber, yaitu membandingkan dokumen resmi African Parks dengan laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen investigasi independen Omnia Strategy LLP, artikel ilmiah, serta laporan organisasi internasional yang membahas kasus Suku Baka.

Ketiga, triangulasi antar aktor, yaitu membandingkan representasi yang diberikan oleh organisasi pengelola taman, lembaga investigasi independen, organisasi advokasi masyarakat adat, serta literatur akademik untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi Tradisi Suku Baka dalam Model Tata Kelola Konservasi African Parks

Sebagai INGO, African Parks menegaskan bahwa perlindungan HAM merupakan bagian integral dari tata kelola konservasi yang mereka terapkan. Dalam situs resminya, African Parks menyatakan bahwa seluruh operasional organisasi berpedoman pada berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (African Parks, 2026a). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendekatan lima langkah yang terdiri atas *protect and prevent, report and record, investigate, correct, dan communicate*. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat lokal ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan konservasi. Akan tetapi, kasus konservasi African Parks di OKNP memperlihatkan adanya kontradiksi antara komitmen normatif tersebut dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Menurut penulis, peran *harming* African Parks terhadap Suku Baka diwujudkan melalui kriminalisasi terhadap sistem kehidupan masyarakat lokal dalam tata kelola konservasinya. Selama ini, hutan bukan sekadar menjadi ruang ekologis, melainkan juga fondasi utama kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Suku Baka. Praktik berburu untuk subsistensi, pengumpulan hasil hutan, serta berbagai ritual adat, merupakan bagian integral dari sistem kehidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun bagi mereka (Inogwabini dkk., 2026; Survival Internasional, 2026). Sementara itu, pendekatan konservasi African Parks menekankan pada penegakan hukum terhadap aktivitas yang dikategorikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kawasan konservasi melalui kontrol teritorial misalnya seperti pembangunan pagar solar dan peningkatan patroli bersenjata (African Parks, 2023; Mukpo, 2025; Pearce, 2024; Simpson & Pellegrini, 2023; Survival Internasional, 2026). Dalam kerangka tersebut, praktik adat yang selama berabad-abad menjadi bagian dari kehidupan Suku Baka tidak lagi dilihat sebagai bagian dari sebuah hak, melainkan didefinisi sebagai praktik ilegal atau kriminal yang melanggar aturan kawasan konservasi. Pendekatan semacam ini menjadikan aktivitas tradisional masyarakat lokal diposisikan sebagai ancaman terhadap perlindungan alam (World Rainforest Movement, 2022).

Melalui model tata kelola konservasi yang diterapkannya, African Parks mengkriminalisasi praktik kehidupan Suku Baka. Kriminalisasi tersebut kemudian menghasilkan pembatasan akses masyarakat terhadap wilayah leluhur mereka. Karena konservasi African Parks menerapkan regulasi zonasi yang ketat dan pembatasan akses terhadap kawasan hutan yang mereka lindungi, Suku Baka kehilangan akses terhadap ruang yang selama ini menjadi sumber utama kehidupan mereka (Pyhälä dkk., 2016). Pembatasan akses terhadap kawasan hutan tidak hanya membatasi mobilitas mereka, tetapi juga merampas hak mereka untuk mempertahankan mata pencaharian, memperoleh pangan, menjalankan praktik budaya, serta mempertahankan identitas sebagai masyarakat lokal. Berdasarkan hal ini, maka tata kelola konservasi African Parks justru menghasilkan pelanggaran HAM yang tidak hanya melalui pembatasan ruang fisik, tetapi juga menghancurkan sistem kehidupan yang menopang keberlangsungan Suku Baka.

Lebih jauh, redefinisi terhadap praktik tradisional sebagai tindakan ilegal menciptakan legitimasi bagi penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum konservasi. Karena tradisi itu dikriminalisasi, Suku Baka menjadi diperlakukan sebagai pemburu liar yang mengancam keamanan OKNP (Jones, 2025; Rainforest Foundation UK, 2025). Ketika Suku Baka memasuki wilayah leluhur mereka untuk berburu atau mengumpulkan hasil hutan, mereka diposisikan sebagai pelaku pelanggaran kawasan konservasi. Tata kelola semacam ini kemudian memberikan validasi bagi penjaga taman untuk melakukan tindak kekerasan terhadap mereka (Jones, 2025; Rainforest Foundation UK, 2025). Hal ini terlihat dari laporan yang menyebutkan bahwa penjaga taman yang didanai, dilatih, dan dipersenjatai oleh African Parks melakukan penyiksaan, pemukulan, hingga pelecehan terhadap Suku Baka yang berupaya mengakses OKNP (Survival Internasional, 2026).

Konsekuensi dari tata kelola konservasi tersebut kemudian berlanjut pada marginalisasi Suku Baka sebagai masyarakat lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Pembatasan akses ke dalam wilayah tersebut telah menyebabkan peningkatan kemiskinan dan kelaparan bagi Suku Baka yang sangat bergantung pada hutan, di mana daging satwa liar menyumbang 38–48% porsi makan harian dan sumber daya liar mencapai 65–72% dari total konsumsi makanan mereka (Mavah dkk., 2018; Pyhälä dkk., 2016). Lebih jauh, masyarakat lokal tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya, tetapi juga mengalami alienasi dari ruang hidup mereka sendiri di mana mereka merasa terasing dari tanahnya sendiri (European Parliament, 2024; Mavah dkk., 2018). Mavah dkk (2018) mencatat bahwa masyarakat lokal, termasuk Suku Baka, merasa tidak lagi diakui sebagai pemilik sah atas tanah dan ekosistem yang selama ini memberikan kehidupan mereka karena otoritas pengelolaan kawasan konservasi yang sepenuhnya diambil alih oleh African Parks menciptakan jarak antara mereka dengan lingkungan yang selama ini mereka kelola secara berkelanjutan.

Kriminalisasi terhadap tradisi Suku Baka ini menunjukkan bahwa model tata kelola konservasi African Parks dibangun tanpa mengintegrasikan kebutuhan dan sistem kehidupan masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai subjek pengelolaan kawasan, melainkan hanya sebagai objek dari regulasi. Pasalnya, dibandingkan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pelestarian alam, pendekatan konservasi yang diterapkan African Parks justru mengabaikan sistem pengetahuan dan hukum adat yang telah lama mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan. Secara historis, komunitas di wilayah Lembah Kongo, termasuk Suku Baka, telah mengembangkan mekanisme pelestarian alam melalui praktik seperti larangan berburu musiman, rotasi pemanfaatan sumber daya, serta penetapan kawasan hutan sakral (Inogwabini dkk., 2026). Praktik tersebut bahkan terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang dengan biaya yang lebih rendah dibanding konservasi modern saat ini (Inogwabini dkk., 2026; Survival Internasional, 2026). Namun, kehadiran rezim konservasi modern yang terpusat ini justru menyingkirkan sistem lokal tersebut dan menggantinya dengan model pengelolaan yang bersifat *top-down*. Padahal, hal tersebut justru menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan ancaman bagi konservasi, melainkan aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem alam dan satwa itu sendiri.

Oleh karena itu, pelanggaran HAM terhadap Suku Baka berakar pada model tata kelola konservasi yang sejak awal mengabaikan posisi masyarakat lokal sebagai ‘mitra’ konservasi yang setara. Ketika sistem pengetahuan lokal dikesampingkan dan tradisi masyarakat diredefinisi sebagai ancaman terhadap kawasan lindung, kriminalisasi menjadi bagian inheren dari tata

kelola konservasi yang diterapkan African Parks. Dengan demikian, peran African Parks dalam mencederai HAM Suku Baka diproduksi melalui tata kelola konservasi yang mengkriminalisasi sistem kehidupan mereka. Kriminalisasi tersebut menjadi titik awal yang melahirkan pembatasan akses terhadap wilayah leluhur, penggunaan kekerasan dalam penegakan konservasi, serta marginalisasi sosial, ekonomi, dan budaya Suku Baka. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa tata kelola konservasi semacam ini tetap dipertahankan meskipun menghasilkan berbagai pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagian selanjutnya menganalisis orientasi akuntabilitas African Parks dalam pengelolaan OKNP.

Pengaruh Orientasi Akuntabilitas African Parks dalam Menopang Keberlanjutan Pelanggaran HAM terhadap Suku Baka

Melihat bahwa model tata kelola konservasi African Parks yang mengkriminalisasi tradisi Suku Baka tetap dipertahankan meskipun telah memunculkan berbagai pelanggaran HAM, penulis berargumen bahwa keberlanjutan model tersebut berkaitan dengan orientasi akuntabilitas African Parks yang lebih diarahkan kepada donor (*upward accountability*) dibandingkan masyarakat lokal yang terdampak langsung (*downward accountability*).

Sebagai INGO, keberlangsungan operasional African Parks sangat bergantung pada dukungan pendanaan donor. Pasalnya, struktur pendanaan memainkan peran krusial dalam membentuk orientasi program dan praktik operasional INGO di lapangan. Penulis memandang bahwa kondisi tersebut membentuk prioritas arah pertanggungjawaban African Parks menjadi cenderung bersifat ke atas (*upward accountability*). Pasalnya, ketergantungan finansial yang tinggi ini menjadikan donor sebagai aktor yang memiliki posisi penting dalam menentukan keberlanjutan organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Barber dan Bowie (2008) Szporluk (2009), struktur pendanaan semacam ini membentuk orientasi akuntabilitas INGO karena organisasi harus terus menunjukkan bahwa program yang dijalankan mampu memenuhi ekspektasi para penyandang dana. Dalam kasus African Parks, mereka secara eksplisit mengungkapkan bahwa tanggung jawab atas manajemen yang efektif dan transparan diberikan kepada donor (African Parks, 2015). Bahkan, mereka juga mengakui bahwa pengelolaan perlindungan kawasan mereka juga sepenuhnya bergantung pada pendanaan donor (African Parks, 2015). Ketergantungan ini bersifat signifikan dikarenakan sebesar 80% total pendanaan mereka berasal dari dana hibah individu, yayasan, institusi dana, organisasi konservasi, dan pemerintah (African Parks, 2024b). Dengan komposisi pendanaan tersebut, keberlanjutan African Parks menjadi sangat bergantung pada kemampuannya dalam mempertahankan kepercayaan donor. Sehingga, ukuran keberhasilan program yang ditampilkan menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada penyandang dana.

Lebih jauh, dominasi donor tidak hanya menentukan keberlanjutan finansial African Parks, tetapi juga membentuk cara mereka dalam mendefinisikan keberhasilan konservasi. Salah satu donor kawasan OKNP adalah US Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) yang secara kelembagaan membingkai perdagangan satwa liar sebagai persoalan keamanan dan penegakan hukum (African Parks, 2024b). Hal ini tercermin dalam dukungan INL terhadap penguatan kapasitas penjaga taman (*ranger*), sistem intelijen, pengawasan kawasan, serta penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar (Glenn, 2018; US GAO, 2020). Namun, dukungan tersebut tidak berarti bahwa donor secara langsung mendorong penggunaan kekerasan terhadap masyarakat lokal. Pengaruh donor bekerja secara tidak

langsung melalui pembentukan indikator keberhasilan konservasi yang menitikberatkan pada efektivitas patroli, pengamanan kawasan, dan penindakan *anti-poaching*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Duffy dkk (2019) bahwa keberhasilan konservasi dalam pendekatan semacam ini cenderung direpresentasikan melalui indikator-indikator yang mudah diukur dalam perlindungan kawasan, seperti penurunan aktivitas perburuan liar maupun pemulihan populasi satwa liar. Hal ini tercermin pada mekanisme evaluasi konservasi African Parks yaitu Verifiable Nature Unit (VNU) sebagai sistem *monitoring, reporting, and verification* (MRV) yang dirancang untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi dampak ekologis pendanaan sehingga dapat menjadi dasar transaksi berbasis kinerja, melalui indikator seperti keutuhan habitat dan spesies (African Parks, 2026f). Dalam kondisi tersebut, perhatian organisasi lebih diarahkan pada pencapaian target keamanan kawasan sehingga tindakan represif oleh penjaga taman dapat dipandang sebagai bagian dari keberhasilan konservasi untuk mencapai indikator-indikator tersebut.

Karena dukungan pendanaan donor diberikan untuk memperkuat kapasitas pengamanan kawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar, indikator keberhasilan yang perlu ditunjukkan African Parks menjadi sangat berorientasi pada capaian keamanan kawasan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mempertahankan pendekatan konservasi yang menempatkan patroli bersenjata, pengawasan intensif, dan pengendalian akses sebagai instrumen utama perlindungan kawasan. Pola tersebut terlihat dalam laporan African Parks mengenai OKNP yang lebih banyak menonjolkan penyitaan lebih dari 89.000 kilogram daging satwa liar dan 830 senjata ilegal, serta pemantauan satwa melalui penggunaan berbagai teknologi pengawasan seperti 60 *camera traps*, 12 *GPS collars* pada gajah dan hyena, EarthRanger, serta Information Analysis Unit yang digunakan untuk mendukung patroli, pemantauan satwa liar, dan penindakan aktivitas perburuan liar (African Parks, 2024b, 2026b).

Indikator-indikator tersebut hampir seluruhnya berorientasi pada capaian penegakan hukum dan perlindungan satwa liar yang dapat diukur secara kuantitatif. Keselarasan ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan konservasi African Parks sangat dekat dengan logika penegakan hukum yang menjadi agenda donornya. Akan tetapi, hubungan antara donor dan implementasi konservasi tidak berlangsung secara langsung terhadap petugas lapangan, tetapi melalui mekanisme manajemen INGO. Ketika keberhasilan konservasi didefinisikan berdasarkan indikator yang dapat diukur, maka manajemen African Parks memiliki insentif untuk mempertahankan standar operasi yang memprioritaskan pengendalian teritorial dan penegakan hukum konservasi (African Parks, 2026f). Sehingga dalam hal ini, penjaga taman menjadi aktor implementasi yang menjalankan target kelembagaan organisasi melalui patroli, pengawasan kawasan, dan tindakan terhadap aktivitas yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran konservasi.

Dominasi orientasi tersebut juga terlihat dari strategi African Parks dalam memanfaatkan satwa karismatik yang langka sebagai simbol keberhasilan konservasi karena spesies-spesies tersebut memiliki daya tarik emosional yang tinggi dalam kampanye penggalangan dana. Menurut Brockington dan Scholfield (2010), strategi memanfaatkan daya tarik satwa karismatik semacam ini digunakan oleh organisasi konservasi sebagai instrumen untuk menarik dukungan pendanaan sekaligus membangun legitimasi moral. Pola tersebut tampak jelas dalam laporan tahunan maupun laman resmi OKNP di mana African Parks secara konsisten menampilkan foto-foto profesional Gorilla Lossi, gajah hutan Afrika, hyena, dan berbagai spesies karismatik lainnya sebagai representasi utama keberhasilan kawasan konservasi. Narasi yang dibangun juga lebih

banyak menonjolkan keberhasilan perlindungan satwa, pemantauan populasi spesies, serta pengamanan habitat (African Parks, 2024a).

Strategi tersebut berkorelasi dengan kemitraan pendanaan African Parks yang didominasi oleh organisasi dan yayasan dengan mandat konservasi spesies tertentu. Sebagai contoh, Elephant Crisis Fund (ECF) sebagai salah satu donor OKNP mendukung perlindungan gajah melalui pengawasan, perlindungan berbasis intelijen, serta mitigasi konflik manusia-gajah (African Parks, 2026d). Selaras dengan hal ini, laporan African Parks memberikan uraian yang relatif rinci mengenai indikator-indikator keberhasilan konservasi dan mitigasi konflik manusia-gajah. Dalam laporan tahun 2025 misalnya, African Parks menjelaskan pembangunan parit pelindung di 13 desa, pemasangan pagar listrik seluas ribuan hektare, perlindungan 65 hektare lahan pertanian, dan lain sebagainya di wilayah OKNP (African Parks, 2026a). Berdasarkan hal ini, maka narasi mengenai keberhasilan perlindungan spesies tertentu tidak hanya berfungsi sebagai laporan capaian konservasi, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi yang memperkuat hubungan African Parks dengan jaringan donornya.

Berbeda dengan rincinya pelaporan mengenai capaian konservasi kepada donor, bentuk pertanggungjawaban African Parks kepada Suku Baka sebagai komunitas yang terdampak langsung justru jauh lebih terbatas. Di satu sisi, laporan dari Survival Internasional memang memberikan tekanan terhadap African Parks yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui adanya tindakan pelanggaran HAM di wilayah OKNP pada Mei 2025 (African Parks, 2025b). Dalam pengakuan tersebut, African Parks mengonfirmasi bahwa serangkaian tindak kekerasan itu berakar pada 'kegagalan sistemik' dan tidak memadainya proses pengawasan internal organisasi pada tahun-tahun awal pengelolaan taman nasional. Pengakuan ini memang penting karena secara eksplisit menunjukkan bahwa organisasi memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk mengidentifikasi masalah internalnya sekaligus mengakui adanya dimensi struktural dalam pelanggaran tersebut, bukan mengonfirmasi bahwa fenomena ini terjadi sekadar karena deviasi individu.

Namun di sisi lain, meskipun pengakuan ini mencerminkan adanya upaya di mana INGO memberikan penjelasan atas pelanggaran yang terjadi sebagai bagian dari akuntabilitasnya, namun penulis memandang bahwa pengakuan ini tidak secara otomatis mencerminkan adanya akuntabilitas yang substantif. Akuntabilitas seharusnya tidak berhenti pada pengakuan kesalahan saja, melainkan juga mensyaratkan transparansi, pemulihan korban, serta perubahan institusional yang dapat diverifikasi. Akan tetapi, respons lanjutan yang diambil African Parks justru memperlihatkan bagaimana akuntabilitas dijalankan secara terbatas dan selektif bagi Suku Baka. Penulis mengklasifikasi terlihatnya keterbatasan *downward accountability* tersebut setidaknya dalam tiga aspek.

Pertama, pelanggaran HAM African Parks terhadap Suku Baka terjadi sejak satu dekade yang lalu (Survival Internasional, 2026). Pola kekerasan berulang tersebut menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam tata kelola internal organisasi pada pendekatan *protect and prevent*, yang menegaskan kekuatan kebijakan dan sistem dalam pengelolaan lingkungan dan sosial yang efektif termasuk m audit kepatuhan. Tidak hanya itu, *Survival International* juga mengungkapkan bahwa African Parks sebelumnya secara sengaja tidak mengindahkan laporan mengenai pelanggaran HAM tersebut padahal laporan pertama kali disampaikan pada tahun 2013, dilaporkan kembali pada 2014, hingga laporan spesifik diterbitkan pada tahun 2017 (Survival Internasional, 2026). Hal ini juga sekaligus menunjukkan kontradiksi dalam pendekatan *report*

and record yang diklaim untuk menyediakan sarana bagi pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan insiden atau kekhawatiran yang berkaitan dengan HAM.

Kedua, African Parks memang menerapkan pendekatan penyelidikan yang melibatkan lembaga dan pihak eksternal sebagaimana klaim mereka dalam pendekatan *investigate*. Hal ini terlihat dari tindakannya dalam menyewa firma hukum asal London, *Omnia Strategy LLP*, untuk melakukan investigasi independen selama 16 bulan atas 21 insiden kekerasan (*Omnia Strategy LLP*, 2025). Meskipun langkah ini dapat dilihat sebagai upaya dalam memenuhi standar akuntabilitas prosedural mereka melalui penggunaan aktor independen eksternal, namun terdapat kontradiksi pada pendekatan *communication* yang menyebutkan bahwa kemajuan investigasi apa pun dan langkah-langkah apa yang diambil sebagai hasilnya akan diberi tahu kepada semua mitra dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pernyataan publik untuk memberikan pembaruan melalui proses pelaporan tahunan mereka. Dalam kasus ini, African Parks justru menolak untuk mempublikasikan detail temuan fakta dan rekomendasi dari investigasi tersebut ke ruang publik (Bascomb, 2025). Laporan African Parks juga lebih banyak menonjolkan berbagai capaian positif mengenai program komunitas, sementara penyelesaian pelanggaran HAM terhadap Suku Baka yang menjadi akar persoalan relatif minim diberikan (African Parks, 2024b). Hal ini menunjukkan bahwa investigasi independen lebih berfungsi sebagai mekanisme untuk menunjukkan bahwa organisasi telah menjalankan prosedur pertanggungjawaban kepada donor dan publik daripada sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat terdampak mengevaluasi maupun mengawasi tindak lanjut organisasi. Ketika hasil investigasi, rekomendasi, serta implementasinya tidak dapat diverifikasi secara terbuka, investigasi tersebut lebih berperan menjaga legitimasi organisasi dibandingkan menghasilkan pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat adat.

Ketiga, tindakan African Parks bertentangan dengan komitmen yang mereka canangkan mengenai penegakan HAM pada pendekatan *correct* yang berkaitan dengan tindakan perbaikan, disiplin, hingga korektif. Sebagai respons terhadap kasus ini, African Parks menyatakan telah menyusun kerangka pemulihan, membentuk Panel Independen yang beranggotakan hakim Afrika dan spesialis HAM untuk menangani pengaduan serius, serta meluncurkan Project Bomoko sebagai rencana pengelolaan multi tahun yang bertujuan menanamkan pendekatan berbasis HAM dalam seluruh operasi taman (African Parks, 2024b, 2026a). Namun, tidak ada penjelasan merinci terkait bagaimana kerangka pemulihan tersebut diterjemahkan menjadi bentuk reparasi yang konkret bagi Suku Baka sebagai korban pelanggaran HAM ini. African Parks juga tidak menguraikan jumlah korban yang telah menerima pemulihan, bentuk kompensasi yang diberikan, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku, maupun tingkat implementasi rekomendasi investigasi independen yang dimaksud. Sebaliknya, mereka hanya menegaskan komitmen normatif berupa *zero tolerance* terhadap pelanggaran HAM serta peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis di atas, orientasi akuntabilitas African Parks yang terlihat lebih diarahkan kepada donor (*upward*) dibandingkan masyarakat lokal (*downward*) menjelaskan mengapa model tata kelola konservasi yang mengkriminalisasi tradisi Suku Baka tetap dipertahankan meskipun telah memunculkan berbagai pelanggaran HAM. Dalam kondisi tersebut, mekanisme akuntabilitas tidak berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap praktik yang merugikan masyarakat lokal, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan legitimasi organisasi di hadapan para penyandang dana. Akuntabilitas yang ditampilkan African Parks lebih

mencerminkan akuntabilitas semu, yang didefinisikan penulis sebagai suatu bentuk akuntabilitas berupa pemenuhan prosedur formal tanpa dampak korektif yang nyata. Akuntabilitas semacam ini lebih seperti 'kepatuhan performatif' yang ditampilkan hanya untuk 'formalitas' dalam menjalankan prosedur pendekatan penegakan HAM yang telah diklaim. Dengan demikian, pelanggaran HAM terhadap Suku Baka menjadi konsekuensi dari struktur akuntabilitas organisasi yang lebih memprioritaskan pemenuhan indikator performa kepada donor daripada mekanisme koreksi terhadap pelanggaran yang dialami masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa African Parks berperan dalam mencederai HAM Suku Baka melalui model tata kelola konservasi yang mengkriminalisasi sistem kehidupan masyarakat lokal. Dalam model tersebut, praktik berburu subsisten, pemanfaatan hasil hutan, dan akses terhadap wilayah leluhur diredefinisi sebagai ancaman terhadap kawasan konservasi. Kriminalisasi tersebut kemudian melahirkan pembatasan akses terhadap ruang hidup, melegitimasi penggunaan kekerasan, serta memarginalisasi Suku Baka secara sosial, ekonomi, dan budaya. Keberlanjutan model tata kelola konservasi tersebut berkaitan dengan orientasi akuntabilitas African Parks yang lebih diarahkan kepada donor (*upward accountability*) dibandingkan kepada masyarakat lokal (*downward accountability*). Ketergantungan organisasi terhadap pendanaan donor mendorong African Parks mempertahankan indikator keberhasilan konservasi yang mudah dipertanggungjawabkan kepada penyandang dana, seperti penegakan hukum terhadap perburuan liar, pengamanan kawasan, perlindungan spesies karismatik, dan capaian-capaian ekologis yang dapat diukur secara kuantitatif. Dalam kasus ini, kepentingan dan pengalaman Suku Baka sebagai masyarakat yang terdampak langsung menjadi kurang memperoleh ruang dalam mekanisme pertanggungjawaban African Parks.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memperkenalkan konsep akuntabilitas semu untuk menjelaskan bagaimana mekanisme akuntabilitas formal dalam INGO tetap dapat berjalan tanpa menghasilkan pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat lokal. Dalam kasus African Parks, pengakuan atas pelanggaran HAM, investigasi independen, maupun berbagai komitmen kelembagaan belum diikuti dengan transparansi, reparasi korban, dan perubahan institusional yang dapat diverifikasi. Temuan ini memperluas literatur mengenai peran INGO yang mencederai HAM dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan dampak destruktif terhadap masyarakat lokal tidak hanya dipengaruhi oleh implementasi program konservasi, tetapi juga oleh orientasi akuntabilitas organisasi yang menentukan kepada siapa pertanggungjawaban lebih diprioritaskan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena seluruh analisis dilakukan melalui studi pustaka, tanpa pengumpulan data lapangan secara langsung di OKNP Republik Kongo. Oleh karena itu, verifikasi terhadap pengalaman Suku Baka serta dinamika hubungan antara African Parks dan donor masih bergantung pada laporan, publikasi, dan dokumen pihak ketiga yang tersedia. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi temuan ini melalui penelitian lapangan yang melibatkan masyarakat lokal, pengelola taman nasional, pemerintah Republik Kongo, dan lembaga donor untuk menguji secara lebih komprehensif terkait bagaimana orientasi akuntabilitas INGO memengaruhi praktik konservasi African Parks dan relasinya dengan perlindungan hak masyarakat adat di tingkat lokal.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan tidak ada *conflict of interest* dalam penelitian ini.

Funding

Tidak terdapat sumber dana eksternal dalam penelitian ini.

AI Usage Statement

AI generatif digunakan pada tahap awal sebagai alat bantu pengembangan draf. Penulis melakukan verifikasi terhadap naskah akhir dan bertanggung jawab atas seluruh isinya.

Data Availability

Data pendukung penelitian dapat diperoleh melalui penulis korespondensi.

DAFTAR PUSTAKA

- African Parks. (2015). *African Parks Annual Report 2015: Conservation At Scale*.
- African Parks. (2023, Juli 5). *A 20km solar fence in Odzala-Kokoua National Park, Congo...* X. <https://x.com/AfricanParks/status/1676561701959860224>
- African Parks. (2024a). *About Odzala-Kokoua National Park - Visit Odzala*. Parc National Odzala-Kokoua. <https://visitodzala-kokoua.org/en/our-story/>
- African Parks. (2024b). *The DECADE to make A DIFFERENCE: African Parks Annual Report 2024*. <https://www.africanparks.org/annual-report-2024>
- African Parks. (2026a). *25 Years of Collective Impact*. <https://www.africanparks.org/sites/default/files/0424%20-%20AP%202025%20Annual%20Report%20-%20Interactive%20-%20FINAL.pdf>
- African Parks. (2025b). African Parks' Response to Conclusion of Independent Human Rights Investigation in Odzala-Kokoua National Park. Dalam *Full Response Statement*. African Parks.
- African Parks. (2026c). *Our Story*. African Parks. <https://www.africanparks.org/about-us/our-story>
- African Parks. (2026d). *Strategic Funding Partners*. African Parks. <https://www.africanparks.org/strategic-funding-partners>
- African Parks. (2026e). *The African Parks Model*. African Parks. <https://www.africanparks.org/about-us/our-story/the-african-parks-model>
- African Parks. (2026f). *Verifiable Nature Unit (VNU)*. African Parks. <https://www.africanparks.org/verifiable-nature-unit-vnu>
- Barber, M., & Bowie, C. (2008). How international NGOs could do less harm and more good. *Development in Practice*, 18(6). <https://doi.org/10.1080/09614520802386520>
- Bascomb, B. (2025, Mei 13). *African Parks acknowledges abuse by park staff in Congo, but withholds full report*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/short-article/2025/05/african-parks-acknowledges-abuse-by-park-staff-in-congo-but-withholds-full-report/>
- Brockington, D., & Scholfield, K. (2010). The conservationist mode of production and conservation NGOs in sub-Saharan Africa. *Antipode*, 42(3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2010.00763.x>

- Crack, A. (2020). International Nongovernmental Organizations (INGOs): Accountability. Dalam *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (3 ed., Vol. 5). Routledge. <https://doi.org/10.1081/E-EPAP3-120052298>
- Duffy, R., Massé, F., Smidt, E., Marijnen, E., Büscher, B., Verweijen, J., Ramutsindela, M., Simlai, T., Joanny, L., & Lunstrum, E. (2019). Why we must question the militarisation of conservation. Dalam *Biological Conservation* (Vol. 232). <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.013>
- European Parliament. (2024, Maret 12). *Atrocities committed by African Parks rangers against the Baka in the EU-funded Odzala-Kokoua National Park (Republic of Congo) | E-000759/2024 | European Parliament*. Parliamentary question. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2024-000759_EN.html
- George, T., & Merkus, J. (2025, Januari 14). *Explanatory Research | Definition, Guide, & Examples*. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/explanatory-research/>
- Glenn, R. H. (2018, Mei 8). *Press Briefing on Wildlife Trafficking in Africa - United States Department of State*. US Department of State. <https://2017-2021.state.gov/press-briefing-on-wildlife-trafficking-in-africa/>
- Inogwabini, B.-I., Angoué, C. A., Maisels, F., & White, L. J. T. (2026). History, Development, and Politics of Protected Areas in the Congo Basin Countries. Dalam *Resilience and Sustainability in the Congo Basin*. https://doi.org/10.1007/978-3-032-02023-9_19-1
- Jones, M. (2025, Mei 9). *African Parks: Charity linked to Prince Harry admits human rights abuses in Congo-Brazzaville*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/articles/cq54dgv2p29o>
- Lamont, C. (2022). *RESEARCH METHODS IN INTERNATIONAL RELATIONS* (2nd ed.). SAGE Publishing.
- Mavah, G. A., Funk, S. M., Child, B., Swisher, M. E., Nasi, R., & Fa, J. E. (2018). Food and livelihoods in park-adjacent communities: The case of the Odzala Kokoua National Park. *Biological Conservation*, 222. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.03.036>
- Menon, A. (2025, Januari 9). *Social sciences shape effective conservation strategies*. Mongabay. <https://india.mongabay.com/2025/01/social-sciences-shape-effective-conservation-strategies/>
- Morgan, H. (2022). The Qualitative Report The Qualitative Report Conducting a Qualitative Document Analysis Conducting a Qualitative Document Analysis. *Number 1 How To Article*, 27, 1–3. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Mukpo, A. (2025, Desember 16). *A Thin Green Line: The 2,000-strong ranger force of African Parks*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2025/12/a-thin-green-line-the-2000-strong-ranger-force-of-african-parks/>
- Murdie, Amanda. (2014). *Help or harm : the human security effects of international NGOs*. Stanford University Press.
- Omnia Strategy LLP. (2025, Mei). *Independent Human Rights Investigation: Statement Upon Conclusion of Investigation*. Independent Human Rights Investigation. <https://www.africanparks.org/sites/default/files/Omnia%20Strategy%20public%20statement%20-%20May%202025.pdf>
- Pearce, F. (2024, September 17). *Fortress Conservation: Can a Congo Tribe Return to Its Forest?* Yale E360. <https://e360.yale.edu/features/batwa-kahuzi-biega-national-park-drc>
- Pyhälä, A., Orozco, A. O., & Counsell, S. (2016). *PROTECTED AREAS IN THE CONGO BASIN: FAILING BOTH PEOPLE AND BIODIVERSITY?* The Rainforest Foundation UK.

- Rainforest Foundation UK. (2025, Juni 4). *African Parks acknowledges multiple human rights violations in the Republic of Congo's Odzala-Kokoua National Park* - Rainforest Foundation UK. Rainforest Foundation UK. <https://www.rainforestfoundationuk.org/african-parks-acknowledges-multiple-human-rights-violations-in-the-republic-of-congos-odzala-kokoua-national-park/>
- Simpson, F. O., & Pellegrini, L. (2023, Juni 6). *Militarized conservation: Insecurity for some, security for others? (commentary)*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2023/06/militarized-conservation-insecurity-for-some-security-for-others-commentary/>
- Survival Internasional. (2026). *FAQ on the Baka, African Parks & Survival's campaign* - Survival Internasional. <https://www.survivalinternational.org/articles/FAQs-Baka-African-Parks>
- Syafruddin. (2023). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. Dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Szporluk. (2009). A Framework for Understanding Accountability of International NGOs and Global Good Governance. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.2979/gls.2009.16.1.339>
- US GAO. (2020, Oktober 2). *Combating Wildlife Trafficking: Agencies Work to Address Human Rights Abuse Allegations in Overseas Conservation Programs* | U.S. GAO. US Government Accountability Office. <https://www.gao.gov/products/gao-21-139r>
- Valencia, M. M. A. (2022). Principles, Scope, and Limitations of the Methodological Triangulation. *Investigacion y Educacion en Enfermeria*, 40(2), e03. <https://doi.org/10.17533/UDEA.IEE.V40N2E03>
- Waris, L. (2022). Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. PT Global Eksekutif Teknologi.
- World Rainforest Movement. (2022). *In Solidarity with Communities Resisting Tree Monocultures*. Bulletin. <https://www.wrm.org.uy/bulletins/issue-263>